

**KESENJANGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA: ANALISIS SOSIOLOGIS
TERHADAP FAKTOR SOSIAL EKONOMI DAN AKSES PENDIDIKAN**

Lathifatus Sa Diyyah

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: lathifatus.sa.diyah24038@mhs.uingusdur.ac.id

Nur Khasanah

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: nur.khasanah@uingusdur.ac.id

Abstract

This study aims to analyze educational inequality in Indonesia from a sociological perspective by highlighting the influence of socioeconomic factors, infrastructure, culture, and government policy. Educational inequality is understood as unequal access, quality, and learning outcomes experienced by individuals or community groups due to differences in socioeconomic conditions. This study uses a descriptive qualitative method with a library research approach. The results show that economic factors are the dominant cause of educational inequality. In addition, limited infrastructure and educational facilities in remote areas exacerbate this inequality. Social and cultural factors also have an influence, especially in rural communities that still have traditional views on education, particularly for girls. The government has made efforts to reduce educational inequality through the Kartu Indonesia Pintar (KIP) program, the Merdeka Curriculum policy based on Permendikbudristek No. 12 of 2024, and the improvement of teacher competence through the Merdeka Mengajar Platform and the Continuing Professional Development Program (PKB). Equitable education in Indonesia requires ongoing collaboration between the government, society, and educational institutions to create a fair, inclusive, and socially just education system.

Keywords: Educational Disparity, Merdeka Curriculum

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesenjangan pendidikan di Indonesia dari perspektif sosiologis dengan menyoroti pengaruh faktor sosial ekonomi, infrastruktur, budaya, dan kebijakan pemerintah. Kesenjangan pendidikan dipahami sebagai ketidaksetaraan akses, kualitas, dan hasil belajar yang

dialami oleh individu atau kelompok masyarakat akibat perbedaan kondisi sosial dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab dominan terjadinya kesenjangan pendidikan. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendidikan di daerah terpencil memperburuk ketimpangan tersebut. Faktor sosial dan budaya juga berpengaruh, terutama pada masyarakat pedesaan yang masih memiliki pandangan tradisional terhadap pendidikan, khususnya bagi anak perempuan. Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengurangi kesenjangan pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP), kebijakan Kurikulum Merdeka berdasarkan Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024, serta peningkatan kompetensi guru melalui Platform Merdeka Mengajar dan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Pemerataan pendidikan di Indonesia membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan berkeadilan sosial.

Kata kunci: Kesenjangan Pendidikan, Kurikulum Merdeka

PENDAHULUAN

Menurut Dahyanti, Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan, individu memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas diri, memperluas wawasan, serta memperoleh mobilitas sosial ke arah yang lebih baik. Namun, realitas pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas masih belum merata. Kesenjangan pendidikan masih menjadi persoalan yang cukup serius, terutama antara kelompok sosial ekonomi tinggi dan rendah,

serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Sejalan dengan penelitian sebelumnya mengatakan bawasannya Pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks, salah satunya berupa kesenjangan pendidikan di wilayah-wilayah terpencil.¹ Kesenjangan pendidikan dapat dipahami sebagai perbedaan dalam akses, kualitas, dan hasil belajar yang diterima oleh individu maupun kelompok dalam masyarakat. Kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak, baik antar kelompok sosial,

¹Nur Dahyanti, dkk, "Analisis Kebijakan dalam Mengatasi Problematika Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia". *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, no.1 (2025):88-89.

ekonomi, maupun antar wilayah secara geografis.²

Faktor sosial ekonomi merupakan salah satu aspek yang paling berpengaruh dalam menentukan akses dan kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang baik memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas belajar yang memadai, memilih sekolah dengan kualitas unggul, serta mendukung kegiatan pembelajaran tambahan seperti bimbingan belajar. Sebaliknya, keluarga berpenghasilan rendah seringkali menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, sehingga pendidikan bukan menjadi prioritas utama. Keterbatasan ini pada akhirnya berpengaruh pada motivasi, peluang, serta capaian akademik peserta didik.³ Selain faktor ekonomi, kesenjangan pendidikan juga dipengaruhi oleh akses terhadap layanan pendidikan. Di beberapa wilayah pedesaan dan daerah terpencil, fasilitas pendidikan yang tersedia masih minim, baik dari segi sarana prasarana, kualitas tenaga pendidik, maupun ketersediaan teknologi pendukung pembelajaran. Ketimpangan akses ini semakin tampak ketika pembelajaran beralih ke sistem digital selama pandemi COVID-19, dimana siswa dari keluarga dan wilayah yang kurang mampu mengalami hambatan serius dalam mengikuti pembelajaran daring akibat keterbatasan perangkat dan jaringan internet.

Kesenjangan pendidikan tersebut pada akhirnya berdampak pada reproduksi ketimpangan sosial di tengah masyarakat. Pendidikan yang seharusnya menjadi sarana pemerataan sosial justru dapat menjadi alat reproduksi stratifikasi sosial ketika akses terhadap pendidikan berkualitas hanya dimiliki oleh kelompok tertentu. Jika tidak ditangani, kesenjangan pendidikan akan berpotensi mereproduksi ketimpangan sosial dan memperkuat struktur stratifikasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sosiologis bagaimana faktor sosial ekonomi dan akses pendidikan berkontribusi terhadap kesenjangan pendidikan di Indonesia, serta memberikan gambaran mengenai implikasinya terhadap peluang mobilitas sosial peserta didik.

²Sela Rizki Azkiyah, Giska Aryola, dan Beny Dwi Lukitoaj. "Isu Kesenjangan Pendidikan di Daerah Terpencil: Solusi untuk Mewujudkan Pendidikan yang Merata". *EDUCREATIVA : Jurnal Seputar Isu dan Inovasi Pendidikan*, no.1 (2025):122-123.

³Ahada Fukaro, "Pengaruh Latar Belakang Sosial terhadap Kesempatan Pendidikan". *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, no.2 (2025):1214-1220.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi kesenjangan pendidikan di Indonesia serta mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam mengatasinya. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam realitas sosial dan kondisi pendidikan yang tidak merata di berbagai daerah.⁴ Jenis penelitian ini bersifat studi kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan data dan informasi yang bersumber dari berbagai literatur ilmiah seperti buku dan jurnal. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan studi literatur dengan menelaah sumber-sumber relevan yang membahas kesenjangan pendidikan, faktor sosial-ekonomi, serta kebijakan pemerataan pendidikan di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yakni menafsirkan dan mengkaji isi dari sumber tertulis untuk menemukan pola, konsep, dan hubungan antarvariabel yang relevan dengan tema penelitian. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: (1) reduksi data, yaitu pemilihan dan penyederhanaan informasi dari berbagai sumber; (2) penyajian data, berupa pengelompokan hasil temuan ke dalam tema utama seperti faktor sosial-ekonomi, kebijakan pemerintah, dan implementasi kurikulum; serta (3) penarikan kesimpulan, yaitu interpretasi akhir terhadap data untuk menemukan makna dan implikasi kebijakan dalam konteks kesenjangan pendidikan di Indonesia. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi kesenjangan pendidikan di Indonesia sekaligus menawarkan pemahaman ilmiah tentang efektivitas kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Kesenjangan Pendidikan

Kesenjangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna (yang bersifat, berciri,) senjang, ketidakseimbangan, ketidaksimetrisan, jurang pemisah. Kesenjangan adalah keadaan yang menunjukkan kondisi tidak setara. Ketidaksetaraan dalam pendidikan merupakan gambaran

⁴Nur Dahyanti, dkk, "Analisis Kebijakan dalam Mengatasi Problematika Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia". *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, no.1 (2025):88-89.

mengenai kondisi kesenjangan pendidikan. Kesenjangan pendidikan dapat didefinisikan dalam beberapa persepektif para ahli. Menurut Murnane, R.J. dan Willett, J.B. mendefinisikan kesenjangan Pendidikan merupakan perbedaan dalam pencapaian akademis antara kelompok siswa yang berbeda, yang biasanya diukur berdasarkan latar belakang sosioekonomi, ras, etnis, atau karakteristik demografis lainnya.

Sedangkan Linda Darling Hammond memberikan definisi kesenjangan Pendidikan sebagai perbedaan dalam kesempatan belajar yang tersedia bagi siswa dari latar belakang sosial ekonomi, etnis, dan budaya yang berbeda. Ia menyatakan bahwa faktor-faktor seperti kualitas guru, fasilitas sekolah, dan dukungan keluarga memainkan peran penting dalam memperluas atau mempersempit kesenjangan tersebut. Pedro Noguera dalam bukunya *The Trouble with Black Boys* menjelaskan bahwa kesenjangan pendidikan muncul ketika ada perbedaan akses, keterlibatan, dan hasil belajar antara kelompok siswa tertentu terutama mereka yang berasal dari golongan minoritas dan keluarga berpenghasilan rendah. Menurutnya, ketimpangan ini tidak terjadi secara kebetulan, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural, seperti masih adanya pemisahan lingkungan sekolah, pembagian sumber daya pendidikan yang tidak merata, serta kebijakan yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu. Jika dibandingkan dengan pendapat para ahli lainnya, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan pendidikan tidak hanya terlihat pada perbedaan nilai atau prestasi, tetapi juga terkait dengan kesempatan memperoleh fasilitas, mutu pendidikan, dan peluang untuk berkembang secara adil bagi setiap siswa.⁵

2. Faktor Penyebab Kesenjangan Pendidikan

a. Faktor Ekonomi

Menurut Fauzi dan Rini (2021), faktor ekonomi berperan signifikan dalam memperlebar kesenjangan pendidikan, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Keluarga dengan pendapatan rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, seperti biaya transportasi, seragam, buku ajar, hingga dukungan pembelajaran tambahan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya angka partisipasi sekolah serta

⁵Anti Wijayanti, Ari Wawan Darmawan, dan Iis Marwan, "Isu-Isu Kontemporer Pendidikan Indonesia : Kesenjangan Pendidikan". *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, no. 3 (2024):188-189.

meningkatnya risiko putus sekolah, terutama pada jenjang menengah. Keluarga dengan tingkat ekonomi lebih baik umumnya memiliki sumber daya yang memadai untuk mendukung pendidikan anak, seperti akses ke sekolah unggulan, les tambahan, serta fasilitas belajar yang lengkap. Sebaliknya, keluarga dengan keterbatasan ekonomi menghadapi hambatan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi keluarga secara langsung memengaruhi kesempatan dan keberlanjutan pendidikan anak.⁶ Sejalan dengan itu, Fitriyani menegaskan bahwa dukungan ekonomi keluarga merupakan faktor penentu dalam memungkinkan anak mencapai jenjang pendidikan lebih tinggi dan meningkatkan mobilitas sosialnya.⁷

b. Faktor Infrastruktur

Keterbatasan infrastruktur pendidikan di wilayah pedesaan masih menjadi faktor signifikan yang memperlebar kesenjangan pendidikan di Indonesia. Banyak sekolah di daerah terpencil berada dalam kondisi yang memprihatinkan, baik dari segi bangunan yang rusak maupun fasilitas belajar yang tidak memadai, sehingga dapat mengancam kenyamanan bahkan keselamatan peserta didik. Selain itu, minimnya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi juga memperburuk kualitas pembelajaran. Di tengah kemajuan era digital, kemampuan mengakses internet dan sumber belajar daring seharusnya menjadi kebutuhan dasar dalam proses pendidikan. Namun, kenyataannya masih banyak sekolah di pedesaan yang belum terjangkau jaringan internet, sehingga guru dan peserta didik kesulitan untuk mengintegrasikan teknologi sebagai sarana pengembangan ilmu. Dari perspektif teologis, hal ini menunjukkan bahwa pemerataan sarana pendidikan merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial untuk menegakkan nilai keadilan ('adl) sebagaimana ditekankan dalam ajaran Islam. Pemerintah dan masyarakat hendaknya berperan aktif dalam memperbaiki kondisi tersebut, sebab menyiapkan sarana pendidikan yang layak termasuk bagian dari upaya *iqāmat al-'ilm* (menegakkan ilmu) yang bernilai ibadah di sisi Allah SWT.⁸

⁶Fauzi, A. & Rini, S.(2021). Pengaruh kondisi sosial ekonomi keluarga terhadap partisipasi pendidikan anak di pedesaan. *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 145–154.

⁷Hanifah Fitriyani, dkk, "Pengaruh Stratifikasi Sosial Terhadap Akses Pendidikan". *Jurnal Sains Student Research* , no.4 (2025): 38-39.

⁸Eka Mahendra Putra, "Mengatasi Kesenjangan Pendidikan Berbasis Maqashid

c. Sulitnya Akses Menuju Sekolah

Sulitnya akses menuju lembaga pendidikan pada daerah tertentu pada dasarnya berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur pendukung, seperti kondisi jalan yang memadai, ketersediaan transportasi umum, serta fasilitas penunjang lainnya yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah melalui alokasi anggaran pembangunan. Faktor geografis yang menantang, misalnya wilayah pegunungan, daerah berawa, maupun kawasan kepulauan terpencil, turut memperburuk situasi tersebut. Dalam kondisi demikian, peserta didik sering kali harus menempuh jarak yang jauh dengan medan yang sulit hanya untuk mencapai sekolah terdekat. Konsekuensinya, banyak anak yang tinggal di daerah terpencil kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak karena hambatan fisik yang menghalangi mereka untuk bersekolah secara konsisten. Ketimpangan ini kemudian menghasilkan lingkaran ketidakadilan sosial, di mana anak-anak di wilayah marginal terus tertinggal dibandingkan dengan mereka yang tinggal di wilayah perkotaan yang memiliki akses pendidikan lebih baik dan mudah dijangkau. Apabila pembangunan infrastruktur dan upaya pemerataan akses pendidikan tidak dijalankan secara serius dan berkelanjutan, kesenjangan tersebut akan terus berlanjut dan berpotensi menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata di seluruh Indonesia.⁹

d. Kurangnya Fasilitas Sekolah

Banyak lembaga pendidikan di wilayah terpencil masih berlangsung dalam kondisi yang jauh dari standar kelayakan. Bangunan sekolah sering kali mengalami kerusakan, ruang kelas tidak tertata dengan baik, serta sarana belajar seperti meja dan kursi berada dalam keadaan lapuk. Selain itu, fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, dan perangkat pembelajaran sangat terbatas atau bahkan tidak tersedia. Pada beberapa kasus, sekolah tidak memiliki bangunan permanen sehingga proses belajar mengajar terpaksa dilakukan di tempat seadanya, seperti gubuk sederhana atau ruang kelas dengan dinding papan yang hampir roboh. Situasi ini tidak hanya memengaruhi kenyamanan dan keamanan pembelajaran, tetapi juga dapat menurunkan motivasi siswa untuk bersekolah. Minimnya fasilitas yang tersedia menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi sumber daya

Syariah". *Islamika Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, no.1 (2025):22-23.

⁹Hujaimah, dkk, Pemerataan akses pendidikan di daerah terpencil: Tantangan dan strategi kebijakan pemerintah . *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan*, (2024):145-158.

pendidikan, di mana sekolah di daerah terpencil sering kali tidak menjadi prioritas dalam pengalokasian anggaran. Akibatnya, tingkat partisipasi pendidikan di wilayah tersebut relatif rendah, yang pada akhirnya membatasi peluang anak-anak untuk meningkatkan kualitas hidup dan berperan dalam pembangunan sosial ekonomi di masa depan.¹⁰

e. Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu faktor yang berkontribusi besar terhadap terjadinya kesenjangan pendidikan di daerah terpencil. Perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan latar belakang keluarga menjadi penentu utama dalam akses anak terhadap pendidikan¹¹. Biaya pendidikan yang mencakup pengeluaran langsung seperti uang sekolah, pembelian buku, dan seragam, serta pengeluaran tidak langsung seperti biaya transportasi dan kebutuhan harian, menjadi beban berat bagi keluarga dengan tingkat ekonomi rendah. Situasi ini diperparah oleh rendahnya tingkat pendidikan orang tua, yang berdampak pada minimnya pemahaman mengenai pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan. Sebagian orang tua lebih memilih melibatkan anak dalam pekerjaan produktif daripada melanjutkan sekolah, sehingga berdampak pada rendahnya angka partisipasi pendidikan di wilayah tersebut dan memperkuat lingkaran kemiskinan antargenerasi.

f. Mahalnya Biaya Pendidikan

Mahalnya biaya pendidikan menjadi salah satu penyebab utama yang memperlebar kesenjangan pendidikan di daerah terpencil. Banyak keluarga dengan kondisi ekonomi rendah tidak mampu menjangkau layanan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka. Beban biaya tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembayaran sekolah, tetapi juga meliputi kebutuhan penunjang seperti seragam, buku pelajaran, alat tulis, hingga biaya transportasi. Ketika kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi, anak-anak dari keluarga kurang mampu seringkali terpaksa berhenti sekolah atau hanya memperoleh pendidikan dalam kualitas yang terbatas. Kondisi ini semakin diperparah oleh minimnya bantuan atau subsidi pendidikan yang seharusnya diberikan pemerintah kepada daerah terpencil untuk mendukung pemerataan

¹⁰Nugroho, A, "Disparitas Anggaran Pendidikan dan Dampaknya terhadap Pemerataan Mutu Sekolah". *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, (2024): 201-204.

¹¹Ahmad Hidayat, dan Muhammad Fajri, Ketimpangan Akses Pendidikan Berdasarkan Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan*, (2022):134-145.

akses pendidikan. Akibatnya, kesenjangan kesempatan belajar antara anak-anak di daerah terpencil dan di wilayah perkotaan semakin membesar, sehingga membatasi peluang mereka untuk meningkatkan kesejahteraan hidup melalui pendidikan yang memadai.¹²

g. Tenaga Pendidik

Permasalahan tenaga pendidik saat ini tidak hanya berkaitan dengan jumlah, tetapi juga kualitasnya. Secara umum, jumlah guru dinilai belum memadai dan pemerataannya belum merata. Di beberapa wilayah terdapat sekolah yang memiliki kelebihan guru, sementara di wilayah lain justru mengalami kekurangan. Ketimpangan ini salah satunya dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia yang sangat luas sehingga distribusi guru menjadi tidak seimbang. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti rekrutmen guru melalui jalur CPNS, pengangkatan guru kontrak, serta pemberian tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di daerah terpencil. Namun, langkah-langkah tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan pemerataan tenaga pendidik. Selain masalah kuantitas, aspek kualitas guru juga menjadi perhatian penting. Guru memiliki peran strategis dalam peningkatan mutu pendidikan, sehingga dituntut untuk memiliki kompetensi dan profesionalitas yang tinggi. Peningkatan keterampilan dan pengembangan profesional guru perlu terus dilakukan agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang siap bersaing dalam era globalisasi.¹³

3. Solusi Pemerintah Untuk Mengatasi Kesenjangan Pendidikan di Indonesia

Upaya dalam mengatasi kesenjangan pendidikan memerlukan kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kolaborasi tersebut mencakup peningkatan investasi pada infrastruktur pendidikan, penguatan kompetensi tenaga pendidik, serta penerapan kebijakan yang bersifat inklusif dan berpihak pada kelompok yang kurang terlayani. Selain itu, penanganan faktor sosial-ekonomi yang menjadi akar ketimpangan, seperti kemiskinan dan diskriminasi, juga perlu dilakukan secara sistematis. Dengan komitmen dan tindakan kolektif

¹² Sela Rizki Azkiyah, Giska Aryola, dan Beny Dwi Lukitoaji, "Isu Kesenjangan Pendidikan di Daerah Terpencil: Solusi untuk Mewujudkan Pendidikan yang Merata . *EDUCREATIVA : Jurnal Seputar Isu dan Inovasi Pendidikan* , no. 1 (2025):122-123.

¹³ Efrizal Problematika Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Ambon*, (2014): 13-14

yang konsisten, upaya global untuk menyediakan pendidikan yang adil dan berkualitas bagi setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial maupun geografis, dapat terwujud.¹⁴

Pada Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah berkewajiban untuk membiayainya. Sementara itu, Pasal 31 ayat (4) menegaskan bahwa negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan nasional. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan dipandang sebagai sektor strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga beriman, berakhlak, serta memiliki nilai moral yang selaras dengan cita-cita bangsa. Salah satu bentuk implementasi ketentuan tersebut adalah program wajib belajar sembilan tahun. Program ini dirancang sebagai upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan dasar hingga tingkat menengah tanpa memungut biaya dari masyarakat, melalui pendanaan yang bersumber dari APBN. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan di lapangan, karena pemerataan akses pendidikan belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan, di mana tidak semua warga negara dapat menikmati layanan pendidikan secara setara, meskipun secara hukum setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.¹⁵

Selain itu dalam Pasal 34 UUD 1945 menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar. Namun, implementasi dari amanat tersebut belum sepenuhnya tercapai, terutama bagi kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rendah. Meski pemerintah telah mengeluarkan sejumlah program bantuan sosial, tantangan seperti ketimpangan sosial-ekonomi antar wilayah dan keterbatasan sumber daya masih menghambat pemerataan hasil kebijakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan. Dalam hal ini pemerintah berupaya untuk

¹⁴Judijanto, dan Loso, Strategi Pendidikan Inklusif: Studi Literatur tentang Upaya Mengatasi Kesenjangan Pendidikan di Berbagai Negara. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, (2025):13-20.

¹⁵Dianawati dan Hartanto, Tanggungjawab Pemerintah dan Kesenjangan Sosial Dalam Pendidikan. *ADIL Indonesia Journal*, no. 2 (2023):57-59.

meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu adalah melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang diwujudkan dalam pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program ini bertujuan memberikan kesempatan belajar seluas-luasnya bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu melalui bantuan pembiayaan pendidikan, seperti pembayaran SPP, penyediaan uang saku, serta pengadaan buku dan perlengkapan belajar. Dengan demikian, KIP diharapkan dapat mengurangi risiko putus sekolah dan memperkecil kesenjangan akses pendidikan antara kelompok ekonomi berbeda.¹⁶

Selain program bantuan sosial, pemerintah juga berupaya mengatasi kesenjangan pendidikan melalui kebijakan Kurikulum Merdeka, yang diperkuat dengan terbitnya Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024. Kebijakan ini menegaskan fleksibilitas dalam penerapan kurikulum serta menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi satuan pendidikan untuk menyesuaikan penerapan kurikulum sesuai kondisi lokal dan kebutuhan siswa. Dukungan pemerintah tidak hanya terbatas pada aspek regulasi, tetapi juga mencakup peningkatan infrastruktur pendidikan, penguatan kapasitas tenaga pendidik, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas kurikulum. Melalui Platform Merdeka Mengajar, guru memperoleh akses terhadap sumber belajar, asesmen, dan pelatihan daring yang memperluas kemampuan pedagogis mereka. Selain itu, alokasi dana pendidikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) turut berperan dalam mendukung pengadaan perangkat pembelajaran berbasis teknologi agar akses pendidikan lebih inklusif. Dalam aspek pengembangan kompetensi guru, pemerintah menerapkan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) sebagai sarana peningkatan kapasitas pendidik dalam menerapkan strategi pembelajaran inovatif. Program ini meliputi pelatihan berbasis teknologi, lokakarya, serta pembentukan komunitas belajar yang memungkinkan guru berbagi praktik baik dalam penerapan Kurikulum Merdeka. Pemerintah juga menggandeng perguruan tinggi dan organisasi profesi guru untuk memberikan pendampingan di wilayah dengan keterbatasan sumber daya. Dengan strategi tersebut, diharapkan kesenjangan pendidikan antarwilayah dapat berkurang, serta pemerataan kualitas

¹⁶Amadi, dkk, "Upaya Pemerintah dalam Menjamin Hak Pendidikan untuk Seluruh Masyarakat di Indonesia: Sebuah Fakta". *Educatio: Jurnal Ilmu Kependidikan*, (2023):164-166.

pendidikan nasional dapat tercapai secara berkelanjutan.¹⁷

KESIMPULAN

Kesenjangan pendidikan di Indonesia merupakan permasalahan struktural yang dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, infrastruktur, budaya, dan kebijakan pemerintah. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama yang memperlebar jurang akses pendidikan, di mana keluarga dengan kemampuan finansial rendah cenderung mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Selain itu, keterbatasan infrastruktur, kurangnya fasilitas sekolah, serta sulitnya akses menuju lembaga pendidikan di daerah terpencil memperburuk ketimpangan tersebut. Dari aspek sosial dan budaya, pandangan masyarakat terhadap urgensi pendidikan, khususnya bagi anak perempuan, juga turut memengaruhi rendahnya angka partisipasi sekolah di wilayah pedesaan.

Upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini telah diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program strategis. Program Indonesia Pintar (PIP) dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjadi salah satu langkah konkret dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Selain itu, implementasi Kurikulum Merdeka sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 memberikan ruang fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai kondisi lokal dan kebutuhan peserta didik. Dukungan pemerintah melalui penyediaan infrastruktur, peningkatan kapasitas guru melalui Platform Merdeka Mengajar dan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), serta alokasi dana pendidikan melalui DAK dan BOS, menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan.

Dengan demikian, solusi terhadap kesenjangan pendidikan tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi, tetapi juga pada sinergi kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerataan kualitas tenaga pendidik, peningkatan sarana pembelajaran, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun sistem pendidikan yang adil, adaptif, dan berkeadilan sosial di seluruh wilayah Indonesia.

¹⁷Dewi Syafriani, dkk, "Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Pendidikan Indonesia: Kajian Literatur", *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education*, 2025):89-90.

REFERENSI

- Amadi, A. S. (2023). Upaya Pemerintah dalam Menjamin Hak Pendidikan untuk Seluruh Masyarakat di Indonesia: Sebuah Fakta. *Educatio: Jurnal Ilmu Kependidikan*, 164-166.
- Azkiyah S.R., A. G. (2025). Isu Kesenjangan Pendidikan di Daerah Terpencil: Solusi untuk Mewujudkan Pendidikan yang Merata . *EDUCREATIVA : Jurnal Seputar Isu dan Inovasi Pendidikan* , 122-123.
- Dahyanti, N. D. (2025). Analisis Kebijakan dalam Mengatasi Problematika Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 90-91.
- Fauzi, A. &. (2021). Pengaruh kondisi sosial ekonomi keluarga terhadap partisipasi pendidikan anak di pedesaan. *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 145-154.
- Fitriyani, H. U. (2025). Pengaruh Stratifikasi Sosial Terhadap Akses Pendidikan . *Jurnal Sains Student Research* , 38-39.
- Fukaro, A. (2025). Pengaruh Latar Belakang Sosial terhadap Kesempatan Pendidikan. *Fukaro, A. (2025). Pengaruh latar belakang sosialRanah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1214-1220.
- Hidayat, A. &. (2022). Ketimpangan Akses Pendidikan Berdasarkan Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan*, 134-145.
- Hujaimah, H. P. (2024). Pemerataan akses pendidikan di daerah terpencil: Tantangan dan strategi kebijakan pemerintah . *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan*, 145-158.
- Judijanto, L. (2025). Strategi Pendidikan Inklusif: Studi Literatur tentang Upaya Mengatasi Kesenjangan Pendidikan di Berbagai Negara. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 13-20.
- Lega, D. &. (2023). Tanggungjawab Pemerintah dan Kesenjangan Sosial Dalam Pendidikan. *ADIL Indonesia Journal*, 57-59.
- Nasution, E. (2014). Problematika Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Ambon*, 13-14.
- Nugroho, A. (2024). Disparitas Anggaran Pendidikan dan Dampaknya terhadap Pemerataan Mutu Sekolah. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 201-204.

Putra, E. (2025). Mengatasi Kesenjangan Pendidikan Berbasis Maqashid Syariah . *Islamika Jurnal Ilmu-Ilmu Kelslaman*, 22-23.

Rahmadani, F. (2021). Peran Lingkungan Keluarga dalam Keputusan Melanjutkan Pendidikan Anak. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 201–213.

Suryani, N. &. (2020). Kesejahteraan Guru Honorer dan Dampaknya terhadap Kualitas Pembelajaran. *Jurnal Manajemen Pendidikan* , 287-296.

Syafriani, D. D. (2025). Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Pendidikan Indonesia: Kajian Literatur. *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education*, 89-90.

Wijiyanti A, D. A. (2024). Isu-Isu Kontemporer Pendidikan Indonesia : Kesenjangan Pendidikan. *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat* , 188-189.